



**KONTRIBUSI PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SAMOSIR AGAR
LEBIH MAJU UNTUK MEMBANTU PEMERINTAHAN
KABUPATEN SAMOSIR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ERFAN SITUMORANG
NIM. 1410300040**

PRODI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KONTRIBUSI PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SAMOSIR AGAR
LEBIH MAJU UNTUK MEMBANTU PEMERINTAHAN
KABUPATEN SAMOSIR**

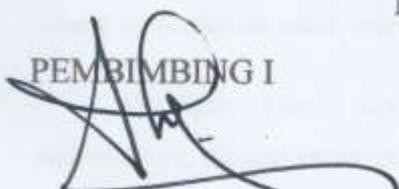
SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ERFAN SITUMORANG
NIM. 1410300040**

PEMBIMBING I


Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP.19620926 1993 1 001

PEMBIMBING II


Dermina Halimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PRODI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: iaib@iainpsidmpn.com

Hal : Skripsi
An. Erfan Situmorang

Padangsidempuan, November 2018
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

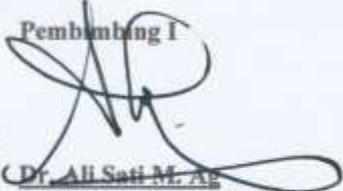
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Riski Ananda Sikumbang yang berjudul “KONTRIBUSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untu Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir” maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan Hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Ali Sati M. Ag
NIP. 19620926 1993 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, S.H. M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Erfan Situmorang
NIM : 1410300040
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untuk Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



Erfan Situmorang
1410300040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erfan Situmorang
NIM : 1410300040
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untuk Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untuk Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir** . Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : November 2018

METERAI
TEMPEL
78F8DAFF432936706
6000
SATU RIBU RUPAH

nyatakan,

ERFAN SITUMORANG
NIM: 141300040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Erfan Situmorang
NIM. : 1410300040
Judul Skripsi : **KONTRIBUSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM
MENDUKUNG MASYARAKAT SAMOSIR AGAR LEBIH
MAJU UNTUK MEMBANTU PEMERINTAHAN KABUPATEN
SAMOSIR**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200 1121004

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 195911091987031003

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 8 November 2018
Pukul : 08.00 WIBs/d Selesai
Hasil/Nilai : 74,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33 (Tiga Koma Tiga Puluh Tiga)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

1 001Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah iain-padangsidempuan.ac.id>-email:fasih.141- psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1879 /In. 14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untuk Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir

Ditulis Oleh : Erfan Situmorang

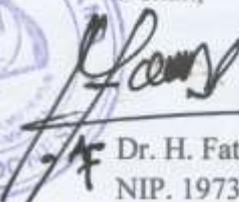
NIM : 14103000 40

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat – syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 13 November 2018

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 

NIP. 19731128 200112

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji Tuhan penulis panjatkan pada Tuhan yang telah merubah siang jadi malam, malam jadi siang, pada Tuhan yang menciptakan alam semesta sekaligus sebagai “sutradaranya”, sehingga kita tetap “nyaman” dalam beriman dan berislam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi sepanjang zaman tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai satu satunya reformis zaman jahiliyah yang berhasil mengeluarkan umatnya dari kekufuran kepada cahaya iman dan islam. Amin.

Adapun skripsi yang berjudul “Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untuk Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam terlaksananya penyusunan skripsi ini merupakan berkat adanya bimbingan dari dosen yang sudah ditetapkan, dan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H, Ibrahim Siregar M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para Wakil Rektor, dan seluruh Civitas Akademika

IAIN Padangsidimpuan yang memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. Ali Sati M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H.M.H. pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, M.A., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda Tercinta Raya Situmorang dan Nurhaida Simarmata yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
6. Saudara-saudara saya yang menjadi penemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga pintu keberhasilan terbuka lebar untuk kita semua sebagai buah perjuangan yang sangat rumit dan panjang. Tetaplah berjuang, berusaha, dan

berdoa kepada-Nya semoga nikmat-nikmat-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua.

7. Rekan-rekan Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Khususnya jurusan Hukum Tata Negara, yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis.
8. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, November 2018
Penulis,

ERFAN SITUMORANG
NIM. 1410300040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Erfan Situmorang

Nim : 1410300040

Judul : Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untuk Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masalah kontribusi partai politik Islam dalam mendukung Pemerintahan Kabupaten Samosir. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi partai politik Islam dalam mendukung masyarakat Samosir agar lebih maju untuk membantu pemerintahan Kabupaten Samosir. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *file research* atau penelitian lapangan yaitu berupa wawancara observasi dan dokumentasi.

Skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai wahana berfikir kritis dan kreatif terhadap sebuah fenomena yang terjadi di sekitar dan bentuk aplikasi keilmuan yang pernah penulis peroleh selama kuliah. Dalam kajian ini digunakan metode lapangan (*field reserch*). Setelah penulis mengadakan penelitian dengan metode di atas, akhirnya dapat disimpulkan.

Partai Politik Islam di Kabupaten Samosir khususnya PKS, tidak memberikan kontribusi dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir, disebabkan hasil suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Samosir. Keberadaan PKS di Kabupaten Samosir mendapat respon yang kurang baik, hal ini nampaknya terkait dengan program-program yang dikelola PKS dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Kabupaten Samosir tidak terlalu berperan aktif.

Partai PKS di Kabupaten Samosir hanya berperan dalam pemberdayaan masyarakat muslim, seperti di bidang politik melalui dukungan para kader-kader partai untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat ketika ingin melakukan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan umum lainnya supaya masyarakat muslim di Kabupaten Samosir dapat memilih pemimpin yang amanah, jujur dan mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Samosir pada umumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
HALAMN PERYATAAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
AKADEMIK.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARABPLATIN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	10
F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	14
A. Partai Politik	14
B. Partai Politik Islam	19
C. Politik Era Reformasi	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Sifat Penelitian.....	31
D. Pendekatan Penelitian.....	32
E. Sumber Data	32
F. Instrumen Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Dokumentasi.....	35
G. Teknik Analisis Data	35
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data.....	36
3. Penarikan Kesimpulan.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Sejarah Berdirinya Pemerintahan Kabupaten Samosir	37
B. Partai Keadilan Sejahterah.....	40
1. Sejarah Partai Keadilan Sejahterah (PKS).....	40

2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	44
C. Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam mendukung Pemerintahan Kabupaten Samosir	46
D. Strategi Pilitik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera Untuk dapat memperoleh suara di Kabupaten Samosir.....	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai wahyu yang mengajarkan kepada penganutnya untuk menyebarkan agama ini dengan cara-cara yang penuh hikmah dan bijaksana agar dengan cara itu orang bisa menerima nilai-nilai Islam yang humanis bagi kemaslahatan manusia dan alam. Islam merupakan agama terakhir yang diridhoi Allah dan penyempurna bagi agama-agama atau wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad.

Selain itu Islam juga mengajarkan kepada penganutnya untuk menerima nilai-nilai Islam yang humanis bagi kemaslahatan manusia dan alam, sebagai mana firman Allah SWT yang berbunyi :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِعُضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. (Q.S Ali-Imran ayat112).¹

¹ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung. Syamsil Quran, 2009) hlm 106.

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan bagi mereka, dimanapun mereka berada, sehingga mereka tidak pernah aman, kecuali jika berpegangan kepada tali agama Allah SWT (diawal Islam). Jaminan ini berupa akad perlindungan yang diberlakukan atas mereka.

Demikian halnya dengan gerakan politik di kalangan umat Islam yang selalu mengambil prinsip-prinsip gerakannya pada Qur'an dan Sunah Nabi (hukum syariah), karena meyakini bahwa Islam merupakan sumber identitas dan sumber motivasi gerakannya. Suatu kekuatan politik disebut sebagai politik Islam, apabila kekuatan politik tersebut mencamtumkan dan menyertakan ketentuan legal-formal Islam dalam rumusan asas dan tujuannya. Pada awal kemerdekaan telah terjadi konflik antara kalangan Islam dengan kalangan kebangsaan mengenai hubungan antara Islam dan politik.²

Kalangan kebangsaan terlalu berlebihan mengkhawatirkan pihak Islam terutama partai Islam (Masyumi) sebagai kekuatan yang potensial untuk meruntuhkan" ideologi nasionalisme yang telah disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang pertama PPKI. Kecurigaan terhadap Islam berlangsung selama Indonesia merdeka, meski dewasa ini kecurigaan itu mengalami transformasi, oleh karena banyak intelektual muda Islam yang menyetujui ide-ide liberal dalam kehidupan politik kenegaraan, bila dibandingkan dengan ide-ide politik ideologis baik menyangkut ideologis maupun persolan legal-formal Islam dalam sistem kenegaraan.

²Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana , 2010), hlm. 90.

Pemikiran politik Islam pada dasarnya dimaksudkan sebagai cara untuk menengahi problem umum tentang hubungan antara politik Islam dan politik (negara). Pemikiran politik Islam modern cenderung mengalami evolusi seperti disebut di atas. Pergeseran penekanan dalam pemikiran politik Islam dipicu kuat oleh keberhasilan modernisasi dan globalisasi, selain faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat cepat.³

Selain itu, persaingan politik pada saat itu tidak lepas dari motif ekonomi, dan ternyata, seperti dikatakan Werthein, gambaran Indonesia umumnya merupakan kelompok ekonomi stasioner. Dalam hal ini dia menganggap, bahwa kehidupan ekonomi pemerintahan republik yang baru berdiri mewarisi banyak kelemahan dari penguasa kolonial.⁴

Menurut pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Partai politik pada saat sekarang ini merupakan kendaraan seseorang kalau mau berniat menjadi salah satu penyelenggara pemerintah, apakah fungsinya sebagai eksekutif maupun legislatif. Demikian menurut Trias political. Kalau dilihat dari sejarah, manusia mengenal partai politik Islam karena Nabi selain sebagai Rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam di Saudi sejak era

³*Ibid.*, hlm. 93.

⁴M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 29.

sepeninggal Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, Arabia yang terbagi atas 4 (empat) golongan, yaitu : Partai Bangsawan Quraisy Makkah (sebagai kelompok pendatang), Partai Yahudi (kelompok minoritas), Partai Bangsawan Madina (kelompok pribumi) dan Partai keluarga Nabi. Melalui partai-partai tersebut diadakan pemilihan umum, dan itulah sebabnya sampai sekarang Negara-negara mayoritas yang berpenduduk Islam membanggakan bahwa pemilihan umum pertama secara demokratis diselenggarakan di Tsaqifah Sa'idah yang sampai saat ini juga diikuti dan dicontoh oleh Negara-negara yang penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya, bahkan juga sudah diikuti oleh negara-negara di benua lainnya.

Secara khusus partai politik Islam adalah partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Partai politik Islam tidak ditujukan untuk meraih suara dalam pemilu atau berjuang meraih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem secular menjadi sistem yang diatur oleh syariah Islam.

Pada saat ini Partai Islam kehilangan suara, ini menjadi ironi ketika penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Jika kita melihat kembali perjalanan panjang partai Islam di Indonesia, maka ada satu realitas yang terjadi, dimana partai Islam tidak pernah mendapatkan angka perolehan suara melewati angka 50 persen setiap pemilu. Dominasi partai Islam tidak terlihat kuat, apalagi jika di korelasikan dengan jumlah penduduk muslim terbanyak bangsa Indonesia. Selama ini banyak faktor penyebab menurunnya kepercayaan umat terhadap parpol Islam. Di antaranya adalah ada yang

lebih suka mementingkan kepentingan pribadi, seperti peluang menjadi pemimpin partai atau pimpinan parlemen atau pejabat tinggi pemerintahan. Bahwa partai politik Islam dianggap belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi umat serta belum maksimalnya parpol Islam dalam memperjuangkan umat Islam.

Karena rakyat tidak harus patuh secara mutlak kepada seorang pemimpin, termasuk pemimpin partai politik. Karena ada batasan- batasan tertentu dimana rakyat wajib patuh dan tidak patuh, bahkan boleh melawan dan memberontak.

Partai politik (Parpol) adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan di dalam pemilihan umum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, partai politik adalah instrument penting dalam kehidupan politik.

Dalam Islam istilah partai politik baru dikenal pada masa modern ini, yakni ketika masyarakat muslim bersentuhan dengan sistem demokrasi. Sebelum ada partai politik, di dunia Islam sudah ada terlebih dahulu lembaga politik bernama *Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd*. Lembaga ini terdiri dari orang-orang berilmu, berintegritas dan punya otoritas untuk mengambil keputusan politik di lingkungan pemerintahan.

Secara khusus partai politik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dan dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai pengertian partai politik:

1. Pengertian Partai Politik Menurut Carl J. Friedrich:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan.

2. Pengertian Partai Politik Menurut R. H. Soltau:

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum.

3. Pengertian Partai Politik Menurut Sigmund Neumann:

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

4. Pengertian Partai Politik Menurut Mac Iver:

Partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD.⁶

⁵Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Politik*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 163.

⁶www.Pengertianahli.com diakses pada tanggal 24-04-2018 pukul 09.07

Kontribusi Partai Politik Islam di Kabupaten Samosir tidak terlalu memberikan kontribusi yang lebih dalam mendukung pemerintahan Samosir, karena masyarakat yang memeluk agama Islam jumlahnya lebih sedikit, sehingga masyarakat tersebut lebih memilih Partai-partai nasional seperti Partai Golkar, PDIP, HANURA, Partai Demokrat. Adapun Partai-partai Islam yang berada di Kabupaten Samosir adalah seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua Partai yang berbasis Islam ini dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samosir hanyalah sebagai Partai pendukung dan belum pernah mengusung calon tersendiri.

Pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengusung calonnya tersendiri, yaitu langsung ketua DPD PKS Samosir, Pardamean Sihotang, yang bertarung di dapil-3 (Harian, Sianjur Mula-mula dan Sitio), namun perolehan suara yang diperolehnya tidak memenuhi syarat untuk lolos sebagai anggota legislatif. Dengan demikian kontribusi partai Islam di Samosir tidak terlalu berperan terhadap pemerintahan baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif karena masyarakat yang beragama Islam di Samosir lebih memilih partai-partai lain seperti Demokrat, PDIP, Hanura daripada memilih partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera

Dengan mempertimbangkan soal kelayakan teknis di atas, perdebatan yang sekarang muncul tentang fraksi Islam sebenarnya hanya berkaitan soal nama. Yakni, bahwa penggabungan ini mungkin saja demi kemudahan teknis belaka memakai nama fraksi Islam. Dalam tradisi politik Indonesia, menjadikan Islam sebagai kategori

politik bisa menimbulkan persepsi yang kurang mengenakkan. Persepsi itu tidak muncul dari kalangan non-Islam, juga dari kalangan Muslim sendiri. Dalam konteks fraksi Islam ini, perdebatan tentang hal ini yang dilakukan Aisyah Amini (PPP) dan Khofifah Indar Parawansa (PKB) dalam waktu lama, keduanya adalah praktisi-praktisi politik Islam handal di PPP yang melibatkan isu-isu yang bersifat aliran, merupakan indikator tentang pandangan stereotip sebagian masyarakat terhadap penggunaan Islam sebagai *trademark* politik.

Belum tentu semuanya itu semata-mata disebabkan oleh ideologi Islamophobia. Atas dasar itu, yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana substansi gagasan itu bisa tetap bergulir, tanpa harus mengalami hambatan-hambatan prematur hanya karena soal nama. Konfigurasi perolehan suara hasil pemilu 7 Juni 1999 merupakan justifikasi politik bagi partai-partai Islam untuk mencuatkan perlunya penggabungan kekuatan-kekuatan mereka dalam sebuah fraksi. Dengan demikian, ide itu sendiri jelas merupakan reaksi politik yang bersifat sangat alamiah. Ini berkaitan dengan kelanjutan kehidupan politik masing-masing partai, khususnya yang memperoleh suara sangat sedikit. Jika demikian halnya, maka sebenarnya nama hanya merupakan sesuatu yang sifatnya sekunder. Dan perdebatan sebenarnya tidak perlu diarahkan pada soal nama, tetapi substansi persoalan tentang keperluan dan kelayakan penggabungan kekuatan partai-partai Islam dalam sebuah fraksi.⁷

⁷Abdurrahman Wahid dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 300.

Pengertian Kontribusi Menurut Para Ahli :

1. Dany H, dalam pemahamannya, definisi kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan.
2. Yandianto makna kontribusi adalah kumpulan adanya uang iuran yang didapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan.
3. T. Guritno menurutnya kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan.⁸

Hal inilah yang menjadikan partai politik Islam di kabupaten Samosir baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif tidak pernah memperoleh suara melewati 50 persen. Selain pimpinannya juga gagal meraih kursi wakil rakyat di wilayah pemilihannya masing-masing. Partai politik Islam di Kabupaten Samosir seperti Partai Keadilan Sejahtera sama sekali tidak memiliki wakil di DPRD Samosir periode 2014-2019.

Kemudian berdasarkan paparan penulis di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang *“KONTRIBUSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM Mendukung PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMOSIR”*.

⁸ www.Indonesiastudent.com diakses pada tanggal 20-04-2018 Jam 09-05

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian hanya pada kontribusi partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kontribusi partai politik dalam mendukung pemerintahan?
2. Bagaimana kontribusi partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kontribusi partai politik dalam mendukung pemerintahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah?

1. Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara.

2. Partai politik Islam merupakan partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam.
3. Kontribusi merupakan suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan.⁹
4. Pemerintahan merupakan organisasi yang menjalankan atau melaksanakan aturan-aturan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan tentang kajian Partai Politik Islam khususnya, serta menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan kontribusi partai Islam di Kabupaten Samosir.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini juga diharapkan untuk memperluas tentang teori-teori Partai politik Islam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis tentang kontribusi partai politik Islam. Sehingga dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan civitas akademika.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh peneliti selama kuliah dan sebagai persyaratan pendidikan jenjang (SI) pada jurusan Hukum

⁹ [www.Indonesiastudent. Com](http://www.Indonesiastudent.Com) diakses pada tanggal 09-11-2018 jam 09-05

Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terdiri dari bagian-bagian agar pembaca lebih mudah memahami isinya.

Bab I berisikan mengenai latar belakang masalah yang dibuat dengan alasan-alasan yang menjadi pedoman. Dilanjutkan dengan batasan masalah yang dibuat untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan mendalam. Dan selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian atau manfaat penelitian yang dijelaskan satu persatu untuk lebih mudah dipahami pada pembahasan selanjutnya.

Bab II menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi uraian secara singkat mengenai teori-teori yang menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti.

Bab III menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa komponen yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum bagaimana kontribusi partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan kabupaten Samosir.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak dan keterbatasan

penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

Daftar bacaan sementara yang berisi semua sumber informasi yang direncanakan untuk digunakan dalam penelitian

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Partai Politik

Ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tentang partai politik. Mariam Budiarto mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Sigmund Neuman mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangannya yang berbeda-beda.

R.H. Sultau dalam *An Introduction in politics*, mendefenisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik (dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih) yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Kehidupan partai politik Indonesia dikenal semenjak adanya Maklumat X Wakil Presiden tahun 1945. Banyak partai politik yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan maklumat ini. Sebelumnya ketika Pemerintahan Proklamasi dibentuk, susunan kabinetnya sama sekali tidak ditempati oleh orang-orang partai. Saat itu

belum terbentuk partai politik. Kabinetnya disebut Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh presiden. Kabinet ini berusia dari tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Kabinet ini berusia sangat singkat. Karena selain ada maklumat wakil presiden tersebut juga karena desakan dari tokoh Nasional yang vocal, Syahrir, untuk membentuk Kabinet Parlementer. Inilah sebenarnya penyimpangan pertama dari UUD 45, karena undang-undang dasar ini menetapkan mengikuti pemerintahan presidensial akan tetapi kenyataan diarahkan berdasarkan maklumat ke sistem parlementer. Mulai saat itu kabinet kedua dan seterusnya dijabat oleh orang-orang partai politik dan bertanggung jawab kepada parlemen. Akan tetapi pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin II (Partai Sosial) jatuh, dan diganti oleh Kabinet Presidensial I yang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1949. Dalam Kabinet Presidensial ini semua kementrian dipimpin oleh orang-orang partai politik.¹

Politik atau Fiqh siyasah adalah bagian dari *Ulumul syar'i* (ilmu agama) yang dalam fiqih Islam terdapat dalam bab Imamah dan jihad. Secara etimologi, fiqih siyasah adalah ilmu yang mengatur tentang urusan negara baik dalam negeri maupun luar negeri. Ruang lingkupnya adalah *Ri'ayah* (memelihara), *riyah* (kepemimpinan), *idaroh* (manajemen), *nizhom* (peraturan) dan *tahtid*(program). Imam Al-Ghazali sendiri berujar, "*syari'ah harus dilindungi dengan daulah (negara atau politik).*"

¹Mitfah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 116.

Itu semua terkait dengan misi besar seorang Muslim yakni yang di firmankan

Allah SWT yang berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Ali-Imran ayat : 110)²

Dalam studi fiqh siyasah, tidak ditemukan istilah partai politik. Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyyah tidak menyebut partai politik. Karena di dalam pemikiran Islam, partai politik belum dikenal. Namun, sejumlah pemikir politik sudah mulai menunjuk pada organisasi yang mewakili rakyat dalam proses politik. Jika ditelusuri dalam sejarah Islam, kelompok-kelompok politik yang terjadi dalam peristiwa Bani Tsaqifah setelah wafatnya Rosulullah antara kaum Anshar dan Muhajirin merupakan peristiwa politik yang dapat dirujuk sebagai bentuk partai politik dalam sejarah Islam.

Herbet Feith di pemilu 1955 telah menggambarkan ideologi partai ke dalam lima aliran besar, yaitu nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme

² Departemen Agama R.I, Al Qu'an dan Terjemahannya., *Op Cit.*, hlm 65

demokratis, dan komunisme. Pada Pemilu 1999 pun muncul banyak corak ideologi partai, seperti nasionalisme sekuler, nasionalisme religius, sosialisme, dan Islam.³

Pemilu 1999 juga menghasilkan pola serupa. Bedanya, pada pemilu 1955 menghasilkan empat partai yang memperoleh dukungan di atas lima belas persen. Sementara pada pemilu 1999 hanya dua partai saja yang memperoleh dukungan setingkat ini, yaitu PDIP dan Golkar, yang masing-masing memperoleh dukungan 33,7 persen dan 22,4 persen. Secara keseluruhan, kalau dilihat dari dukungan yang relatif berarti, di atas tujuh persen, pemilu 1999 menghasilkan lima partai besar: PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Partai-partai lainnya memperoleh suara kurang dari dua persen.

Meskipun pemerintahan yang dibangun oleh hasil pemilu 1999 bukanlah sistem parlementer sebagaimana hasil pemilu 1955, pola koalisi antara partai yang satu dengan partai yang lain juga terjadi. PDIP yang memenangkan pemilu 1999, gagal merebut kursi kepresidenan karena gagal membangun koalisi. Hal ini terjadi karena berdasar perolehan kursi yang dimilikinya sendiri, PDIP tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa dukungan dari partai lain. Sebaliknya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang hanya berbasis pada partai tengahan (PKB) bisa terpilih sebagai presiden karena diboyong oleh koalisi yang lebih besar (Suryadinata, 2002). Pola koalisi itu juga tercermin di dalam pergulatan politik sehari-hari karena DPR memiliki kekuasaan yang jauh besar apabila dibandingkan sebelumnya. Di dalam

³Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 152.

situasi seperti ini, makna partai-partai kecil yang memiliki kursi di parlemen lalu menjadi lebih berarti.

Fenomena pemilu 1955 dan 1999 terulang kembali pada pemilu 2004. Konsentrasi perolehan suara lebih banyak menyebar ke partai-partai tertentu saja. Meskipun demikian, kalau dibandingkan dengan pemilu 1955 dan 1999, jumlah partai yang memperoleh dukungan cukup berarti itu lebih banyak lagi jumlahnya, yaitu tujuh partai. Di samping lima partai sebelumnya, pemilu 2004 menghasilkan dua partai tambahan yang memperoleh suara cukup berarti, yaitu PKS dan PD (Partai Demokrat).⁴

Salah satu fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Bab V pasal 7 ayat C UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan aktor dominan dalam proses pengambilan kebijakan Negara atau pemerintah.

Secara istilah politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak

⁴Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 69.

menentukannya. Pandangan politik menurut syara', realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupaun rakyat.

B. Partai Politik Islam

Partai politik Islam merupakan partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Partai politik Islam tidak ditujukan untuk meraih suara dalam pemilu atau berjuang meraih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem secular menjadi sistem yang diatur oleh syariah Islam. Orang-orang, ikatan antara mereka hingga terorganisir menjadi satu kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama semuanya haruslah didasarkan dan bersumber dari Islam.

Sebelum sebuah partai dapat kemudian dikatakan sebagai sebuah partai Islam apabila setiap orang di dalamnya memahami hakikat serta tujuan yang ingin dicapainya. Pemahaman tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh interaksi manusia/masyarakat tersebut dengan ideologi yang menjadi keyakinannya serta pengalaman dalam menghadapi tantangan eksternalnya. Secara bahasa politik yang dalam bahasa arab disebut as-siyasah berarti mengelola, mengatur, memerintah, dan melarang sesuatu. Atau secara defenisi berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik.

Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mushalih) umat manusia sesuai dengan syara' (suyuthi pulungan), demi terciptanya kemaslahatan. Dalam konteks negara Indonesia, yang notabenenya warga negaranya mayoritas

Islam ini, dinamika politik yang ada khususnya politik Islam memiliki pasang surut dalam pencatutan perpolitikan. Indonesia adalah sebuah negara modern yang dimana di dalamnya dalam proses pemerintahannya menggunakan sistem partai dalam menentukan pemerintahannya seperti negara-negara modern lainnya sehingga politik Islam masuk dalam sistem partai.

Menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pembagian imamah, menurutnya, adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma* ulama. Pandangannya didasarkan pula pada Realitas sejarah *al-khulafa' al -Rasyidun* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari bani Umayyah maupun bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam.

Secara ideal, al-Mawardi menginginkan kepala negara berkuasa menentukan arah kebijakan politik dan tidak dipengaruhi pembantu-pembantunya. Namun kenyataannya, khalifah-khalifah bani Abbas hanya menjadi kepala negara simbol dan bahkan seperti boneka yang dapat dikendalikan oleh para pejabat tinggi negara. Itulah sebabnya al-Mawardi masih menolerir orang yang menguasai kepala negara, sejauh tidak membahayakan negara dan umat Islam.

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imamah adalah wajib. Apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali ini sebenarnya tidak jauh bentuk pemerintahan, kewajiban mendirikan suatu pemerintahan dan mengangkat imam yang berfungsi untuk mengurus persoalan agama dan dunia. Imam atau pemimpin yang

seperti ini dalam sejarah politik Islam dikenal dengan istilah khalifah. AL-Ghazali melihat begitu dekat dan saling berhubungannya antara agama dan kekuasaan politik⁵

C. Politik Islam Era Reformasi

Seiring dengan kejatuhan Orba, umat Islam memanfaatkan momentum *euforia* reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik. Di antaranya mencuatnya kembali cita-cita menjadikan Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan mendirikan partai-partai Islam dengan berbagai orientasi, visi, dan misi perjuangannya. Selama lebih dari tiga dasawarsa dan didukung oleh kekuatan militer serta segala infrastrukturnya ternyata tumbang di tangan gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa (*people's power*), tetapi inilah kenyataan yang dialami Orba. Soeharto akhirnya jatuh dari kekuasaannya. Prestasi yang diklaim Orba sebagai kemajuan pesat, terutama di bidang ekonomi, hanyalah menciptakan jurang pemisah dan kesenjangan sosial. Rakyat kecil mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa. Belum lagi sistem politik dan hukum yang diciptakan rezim Orba yang jelas-jelas sangat sentralistis dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Rahunya Orba sehingga akhirnya tumbang pada 21 Mei 1998.

⁵Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm 29.

Partai politik Islam telah lama mewarnai pentas sejarah tanah air. Sejarah partai Islam dimulai dari pendirian Sarekat Islam (SI) pada tanggal 11 November 1912 di solo. Maka perjalanan Partai Politik Islam bisa dibagi dalam beberapa periode, yaitu: Pra-Kemerdekaan, Pasca-Kemerdekaan, Orde Baru, Pasca Orde Baru. Selama empat periode itu, Partai Politik Islam mengalami pasang surut, dinamika, dan berbagai kejadian. Kajian tentang Partai Politik Islam di masa Pra-Kemerdekaan, Pasca-Kemerdekaan, dan dimasa Orde Baru tampaknya sudah cukup banyak. Pada rentang tahun 1998-1999 banyak Partai Politik Islam yang bermunculan kepermukaan setelah era sebelumnya hanya dijumpai tiga partai politik: Golkar, PPP, dan PDIP. Dan perjalanan dan sepak terjangnya dalam pentas politik nasional di era 1998-1999, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK) Yang dalam pemilu 2004 berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DAN Partai Bulan Bintang (PBB). Selain PAN, PKB-meskipun didirikan oleh para tokoh NU dan basis anggotanya adalah warga Nahdliyyin yang kesemuanya Islam juga berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka. Sementara itu, tiga Partai Islam lainnya yakni PPP, PBB, dan PKS, berasaskan Islam dan punya watak dasar hampir sama: Sektarian, eksklusif, bahkan (kadang) konservatif dan dogmatis. Dan sebagai Parpol (Islam), dibandingkan dengan yang lainnya, PKS tampak lebih punya pendirian, prinsip, dan warna khas yang membuat simpatik publik. Tidak mengherankan, jika beberapa pengamat politik memprediksi bahwa dalam pemilu 2004 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena terkena *electoral threshold*, akan semakin populer serta

meningkat jumlah pemilih dan simpatisannya. Perkiraan ini benar-benar terbukti dalam pemilu 2004, ketika secara spektakuler PKS berhasil menggeser posisi PAN dan PBB yang dalam pemilu 1999 lalu kedudukannya berada diatas PKS.⁶

Partai Politik Islam PascaPemilu 1999

Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan dengan munculnya kembali kekuatan Islam Politik pasca Orba:

- a. Lengsernya rezim Orba telah membawa banyak perubahan terutama dalam pengelolaan politik dan terbukanya ruang partisipasi politik, yang diikuti kebebasan mendirikan partai politik (parpol), termasuk parpol berlabel Islam.
- b. Berdirinya parpol berlabel Islam bisa dipahami, karena secara empiris Indonesia memiliki basis agama yang kuat. Secara historis, parpol Islam pernah mewarnai sejarah kontemporer politik Indonesia.
- c. Kebijakan sekularisasi ideologi politik dan konvergensi ideologi selama rezim Orba, telah menyebabkan peran agama terasa diskriminatif dan cenderung menegaskan sehingga agama tersisih dari sistem politik dan tidak memiliki kesempatan membangun basis politik.⁷

Sementara itu persoalan yang muncul sekarang ini dalam pemilu 7 juni 1999 lalu partai Islam tidak mampu meraih suara secara meyakinkan? PPP, PBB dan PKS yang merupakan representasi partai Islam, ternyata hanya mampu meraih kursi sekitar

⁶*Jejak-Jejak Islam Politik Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2004), hlm 14.

⁷Abdurrahman Wahid, *Op, Cit.*, hlm. 233.

10 persen. Secara politis, aspirasi umat Islam tidak hanya diwakili oleh partai-partai Islam. Umat Islam dari kalangan konservatif seperti NU memiliki PKB. Meskipun partai ini lintas agama, tetapi basis suara pemilihnya tetap mengandalkan massa organisasi keagamaan NU. Demikian halnya dengan PAN yang mengandalkan *mass based* dari muhammadiyah.

Kekalahan Partai Islam dalam pemilu 1999 juga bisa menjadi pelajaran berharga dan harus diambil hikmanya. **Pertama**; secara empiris, simbol-simbol Islam saat ini sudah tidak lagi mampu menjadi daya tarik bagi pemilihan Islam. **Kedua**; kekalahan partai Islam juga berarti menunda pelembagaan agama bagi kepentingan politik. Selama kampanye, partai Islam masih memunculkan simbol-simbol agama dalam pentas politik atau ideologisasi agama masih menjadi alat politik yang efektif.⁸

Problem pemilu pada tahun 1999 yang dibawah electoral threshold membuka masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar dengan memunculkan partai baru bernama ``Partai Keadilan Sosial`` (PKS) yang diharapkan dapat membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan keindahan dan kebahagiaan. Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.

Partai ini berlambangkan dua bulan berwarna kuning emas, dengan garis lurus diantara kedua bulan sabit, yang juga berwarna emas. Bulan sabit dan garis lurus tersebut berada dalam suatu kotak berwarna hitam dan dibawahnya terdapat tulisan

⁸Abdurrahman Wahid, *Op, Cit.*, hlm. 235.

“SEJAHTERA”. Diatas kotak hitam ada sebuah persegi panjang yang panjangnya sama dengan kotak dibawahnya, tetapi dengan ketinggian yang lebih pendek didalamnya tertulis “PARTAI KEADILAN” dengan tulisan berwarna kuning emas. Secara keseluruhan kotak dan persegi panjang itu mensimbolkan ka’bah, kiblat seluruh kaum muslimin yang melambangkan kesatuan ummat. Sedangkan prinsip dasar dari PKS adalah keadilan, persamaan dan keseimbangan, kesatuan nasional, kemajuan, khidmatul ummah demi persatuan dan kerja sama Internasional.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"(Q.S Al-Baqarah ayat 30).⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah hendak menjadikan Khalifah (Pemimpin) di muka bumi karena Allah SWT sangat tahu dengan urgensinya. Pemimpin yang hendak Allah SWT utus pun disesuaikan dengan jenis makhluknya sehingga tidak ada kesulitan bagi pengikutnya untuk berkomunikasi atau mencari solusi permasalahan.

⁹ Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, Syamsil Qur'an, 2009) hlm. 7

Dalam hal yang tidak kalah penting adalah Khalifah (Pemimpin) itu tidak sekedar kemauan tetapi memiliki kriteria maupun keahlian di bidangnya.

Memotret perkembangan Politik Islam Indonesia mutakhir boleh jadi berarti menemukan semacam kebingungan. Belum habis periode “bulan madu” kalangan “Islam Politik” dengan negara Orde baru yang berlangsung sejak awal 1990-an, tiba-tiba saja situasi politik berubah menjadi sangat membingungkan dengan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Dalam pembentukan infrastruktur perjuangan Islam Politik belum selesai dibangun ketika Soeharto jatuh dan mengubah arena politik Indonesia menjadi semacam prototipe “pasar besar politik yang kompetitif. Dalam sepeninggal Soeharto politik Islam seolah dilanda kebingungan.

Pertama, semenjak akhir 1980-an, kalangan Islam memakai strategi *transplacement* untuk mendesakkan perubahan-perubahan politik yang memihak kepentingan mereka. *Kedua*, hasil-hasil transformasi sosio-ekonomi-politik di kalangan Islam dalam bentuk pembesaran dan penguatan kelas menengah memang tampak menggejala dan menjadi faktor politik yang cukup signifikan, namun sebetulnya sama sekali belum selesai. *Ketiga*, salah satu agenda politik penting yang terlupakan dikalangan Islam Politik adalah kesiapan memasuki pasar bebas politik yang ditandai kompetisi yang sengit dan ketiadaan patron besar. *Keempat*, dalam dua dekade terakhir, Orde Baru Politik Islam ditandai oleh pergeseran wacana pokok. Jika digambarkan secara sederhana, perubahan wacana pokok ini terjadi dari Islam Ideologis kearah Islam politik dan akhirnya Islam cultural.

Politik Islam menuntut penganutnya untuk mengikutsertakan akhlak, etika, dan moral serta kecerdasan dalam sikap dan tindakannya. Kalau tidak, maka yang lebih menonjol dalam sikap dan tindakan itu adalah segi kepraktisan atau kepragmatisan belaka. Lebih parah lagi bila sikap dan tindakan tadi hanya mengejar tujuan singkat (umpamanya, kursi atau harta) tanpa memperhatikan apakah tujuan itu dicapai dengan disertai kelurusan, kebenaran dan keadilan atautkah tidak.¹⁰

Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Islam dipahami tidak sekedar agama, tetapi juga sebagai instrument untuk memahami dunia. Lebih jauh pandangan itu mengatakan bahwa Islam tidak mengikuti tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporer. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai masyarakat madani, peradaban yang lengkap, atau bahkan agama dan negara. Sejalan dengan perspektif ini, para pemikir tradisional meyakini bahwa Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama mempunyai hubungan erat dengan politik.

Wacana pemikiran politik Islam dalam konteks historis Indonesia, pada awal-awal kemerdekaan sampai tahun 1960 mengarah pada keyakinan ini. Namun secara faktual gerakan ini belum menunjukkan kesuksesannya. Bahkan gerakan ini menyebabkan hubungan tidak harmonis antara Islam dan Negara, yang berakhir dengan kebuntuan, permusuhan ideologis dan politis, dan bahkan kekerasan. Kondisi ini justru semakin mempersempit ruang gerak Islam politik, terbukti rezim Orde Baru

¹⁰Abdurrahman Wahid dkk, *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 113.

pun tidak mau merehabilitasi masyumi. Serta secara kasat mata, rezim Orde Baru menampakkan sikap Islamophobia, suatu sikap yang sangat menyakitkan umat Islam.

Sederatan pengalaman sejarah, tampaknya tidak memberikan angin segar bagi tumbuh berkembangnya Islam politik di Indonesia. Terakhir nasib Islam politik pada pemilu 1999 sangat mengenaskan. Partai-partai Islam tidak memperoleh suara yang signifikan. Tampaknya massa Muslim cenderung tidak menjadikan pilihan politik sebagai pilihan keagamaan, tetapi sebagai ekspresi ekspektasi akan perbaikan sosial ekonomi di masa depan. Bagian terbesar pemeluk Islam yang terdiri dari kaum buruh dan petani miskin, jauh lebih tertarik dengan tema-tema politik yang berbau imbauan MUI dan juga organisasi Islam agar pemilih muslim tidak memilih partai yang calegnya didominasi non-muslim menjelang pencoblosan pemilu 1999, menjadi tidak manjur.

Di Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan politik etik. Implikasi dari kebijakan demikian tidak hanya berkaitan dengan lahirnya proyek-proyek pembangunan dan sosial, melainkan juga adanya iklim kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat (Imawan 1989).Kebebasan demikian memberi ruang kepada anggota masyarakat untuk membentuk oorganisasi, termasuk partai politik. Yang terakhir ini lebih dimungkinkan karena pemerintah kolonial belanda telah membentuk parlemen (*volksraad*).Selain itu, kemunculan partai-partai di Indonesia berkaitan dengan tumbuhnya gerakan-gerakan, yang tidak saja dimaksudkan untuk memperoleh kebebasan yang lebih luas dari Belanda, melainkan pada akhirnya menuntut adanya

kemerdekaan. Diantara partai-partai yang muncul sebelum Indonesia merdeka adalah Partai Serikat Islam Indonesia, Indische Partij, ISDV (cikal bakal PKI), dan PNI (Karim, 1983).

Setelah merdeka, lahirnya partai-partai politik, berikut matinya partai-partai politik, juga tidak lepas dari dibuka tidaknya keran demokratisasi. Pada awal kemerdekaan, partai-partai politik tumbuh kuat karena munculnya kebijakan untuk membuka seluas-luasnya tertuang di dalam Maklumat Pemerintah No. X pada 16 Oktober 1945. Isi dari maklumat ini adalah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik guna menyalurkan aspirasi dan menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Fenomena serupa terjadi pada pasca-pemerintahan Orde Baru. Jatuhnya pemerintahan Soeharto diikuti oleh tumbuh suburnya partai-partai baru. Sebagaimana tercatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 141 partai politik yang didirikan menjelang pelaksanaan pemilu 1999 (Suryakusuma, 1999), meskipun yang bisa mengikuti pemilu 1999 hanya 48 partai. Banyaknya partai pasca-pemerintahan Orde Baru itu merupakan sebuah ledakan politik setelah sekian lama mendapati keterbatasan berekspresi dan berorganisasi.¹¹

Bahkan para elit masih menaruh ekspektasi bangkitnya Islam politik di pemilu mendatang. Karena itu wajar, menurut Abdurrahman Wahid (1996), jika sementara orang menyatakan pertumbuhan Islam kini menuju kepada kelompok sektarian. Padahal dikalangan umat sendiri ada kecenderungan pembebasan diri dari

¹¹Kacung Marijan *Op. Cit.*, hlm. 60.

simbolisme agama dalam kehidupan sosial politik. Dipertegas dengan sikap umat yang enggan mendukung Islam politik. Kecenderungan ini sebenarnya sudah tampak sejak prakemerdekaan. Sarekat Islam (SI) yang semula mendapat dukungan besar rakyat setelah mempertegas diri sebagai gerakan Islam, justru semakin kecil karena ditinggal pendukungnya (*Bahtiar Effendy*, 1998).¹²

¹²Abdurrahman Wahid, *Op, Cit.*, hlm. 243.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Mengenai lokasi penelitian, penyusun mengambil tempat di kantor DPD Partai-partai yang berbasis Islam yang berada di Kabupaten Samosir dan wilayah daerah pemerintahan Kabupaten Samosir. Karena sesuai dengan judulnya yaitu kontribusi partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun provosal ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu penulis langsung ke lapangan untuk meneliti sejauh mana kontribusi Partai Politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir. Selain itu didukung juga menggunakan metode *library research* yaitu kajian pustaka terhadap buku-buku bacaan, surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang kontribusi partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir, dalam hal ini dapat membantu dalam penyusunan proposal ini.

C. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini penulis menggunakan sifat penelitian eksploratif, yang bertujuan untuk menggali mengenai kontribusi partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir. Sehingga dalam penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci tentang kontribusi partai politik Islam.

D. Pendekatan Penelitian

Pada waktu penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan untuk mencari data-data tentang partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir. Sehingga peneliti dapat menggunakan pendekatan kualitatif, dimana seorang peneliti harus mengumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi mengenai bagaimana peran dari partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dengan responden yang telah di pilih oleh peneliti yakni Ketua DPD Partai-partai Islam di Kabupaten Samosir, pengurus dan masyarakat. Untuk mengetahui peraturan daerah yang mengatur tentang partai politik di Kabupaten Samosir.
2. Data sekunder, yaituyang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum yang merupakan hasil karya ahli hukum. Sehingga penulis dalam penelitian terlebih

dahulu melakukan observasi di kantor DPD Partai-partai Islam yang berada di Kabupaten Samosir untuk mengetahui bagaimana kontribusi Partai politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Perda Kabupaten Samosir tentang Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Delier Noer, *Mengapa Partai Islam Kalah ?, Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Dr. Muhammad Iqbal dan Drs. H. Amin Hussein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Medan: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahman Wahid dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

- Prof. Dr. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2011.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum)¹, Kamus Bahasa Indonesia.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan bagaimana cara untuk mendapatkan data informasi sebanyak-banyaknya dalam penelitian tersebut. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*) yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang kontribusi yang dilakukan maupun kendala yang dialami oleh Partai Politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir.

¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117.

2. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dalam melakukan penelitian, terdapat teknik lain yang dapat digunakan oleh peneliti. Adapun sumber tersebut diantaranya adalah dokumen-dokumen, jadwal kegiatan, dan surat-surat resmi lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan proses reduksi dan intepretasi. Data yang dikumpulkan kemudian akan ditulis dalam bentuk transaksi yang kemudian dilakukan pengelompokan dengan melakukan reduksi data yang tidak terkait kemudian diinterpretasikan yang mengarah pada fokus penelitian.

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisirkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penelitian memilih dan menyeleksi yang diperoleh dan difokuskan pada hal-hal yang

berkaitan dengan Kontribusi Partai Politik Islam dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir.

2. Penyajian Data

Melalui penyajian data, maka data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan dapat merencanakan selanjutnya. Penyajian data yang lebih baik merupakan cara yang lebih utama dalam analisa kualitatif yang valid. Dan data ini sangat penting bagi sipeneliti, sehingga dapat menyajikan data yang lebih baik.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara teknis penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data empiris hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam kerangka teori. Kecocokannya merupakan validitasnya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Pemerintahan Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir adalah hasil pemekaran dari induknya Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Sejarah Kabupaten Samosir, diawali dari sejarah terbentuknya Kabupaten Tapanuli Utara selaku induk dari beberapa Kabupaten pemekaran di wilayah Tapanuli Utara yakni sebagai berikut:

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang pada awal terbentuknya terdiri dari 5 (lima) distrik atau kewedanaan yaitu kewedanaan Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan kewedanaan Dairi. Mengingat demikian luasnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, maka pada Tahun 1964 dilakukan pemekaran dengan Tingkat II Dairi yang ibukotanya berkedudukan di Sidikalang.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, guna mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada Tahun 1985

Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pembangunan yang bersifat Administratif yakni Wilayah Pembangunan I (Silindung) berpusat di Tarutung, Wilayah Pembangunan II (Humbang Timur) berpusat di Siborong-borong, Wilayah Pembangunan III (Humbang Barat) berpusat di Dolok Sanggul, Wilayah Pembangunan IV (Toba) berpusat di Balige dan Wilayah Pembangunan V (Samosir) berpusat di Pangururan yang masing-masing wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati.

3. Pada tanggal 29 Juni 2002, Tim Komisi II DPR RI dibawah Pimpinan Bapak Prof. DR. Manase Malo bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan ke Samosir yang disambut Bupati Toba Samosir dan unsur DPRD Kabupaten Toba Samosir serta masyarakat.

Maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perjuangan segenap komponen masyarakat Samosir, baik yang tinggal di bona pasogit maupun yang berada di perantauan seperti yang tinggal di Jakarta dan di Medan, berdasarkan hak usul inisiatif DPR RI di tetapkanlah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 meresmikan pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu Kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah administrasi

pemerintahan sebanyak sembilan kecamatan dan seratus sebelas desa serta enam kelurahan.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan era reformasi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mendapat perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samsir secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir yakni terpilihnya Ir. Mangindar Simbolon dan Ober Sihol Parulian Sagala, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samsir Periode 2005-2010 yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-740 tanggal 12 Agustus 2005.

Kemudian pada tanggal 13 September 2005, Bupati dan Wakil Bupati Samsir terpilih dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samsir. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Samsir sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera Utara serta sebagai ketentuan yang berlaku sekaitan dengan dengan tugas dan kewajiban pemerintah.¹

B. Partai Keadilan Sejahtera

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera(PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan atas langkah antisipasi yang diambil para aktifis dakwah yang ada di Partai Keadilan Sejahtera (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Provinsi dan 163 kursi DPRD kpt/kabupaten). Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik dimasa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan professional.

Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan kearah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Problem pemilu pada tahun 1999 yang dibawah electoral therashold membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama “Partai Keadilan Sejahtera” (PKS) yang diharapkan membuat jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan.

Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dipelopori oleh

¹[https:// googleweblight. Com](https://googleweblight.com) diakses pada tanggal 02-08 pukul 09.08

Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

Pada tahun 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyambut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai Kutjing Kurap. KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.

Adapun landasan partai ini adalah al-Qur'an yang meliputi surat al-Syura: 13, yang berbunyi :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى

الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

﴿١٣﴾

Artinya : Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya) (Q.S Al-Syura ayat 13)²

Kemudian di ayat lain juga yaitu al-Nur 55 yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan ia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.(Q.S An – Nur ayat 55)³

² Departemen Agama R.I, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*,(Sabiq, 2009) hlm. 484.

³Ibid., hlm 357.

Selain itu juga terdapat pada al shaf:10-13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾
وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (Q.S Al-
Shaf ayat 10)

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan
Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui (Q.S Al-Shaf ayat 11)

Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke
dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan
kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah
keberuntungan yang besar (Q.S Al-Shaf ayat 12)

Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari
Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang beriman (Q.S Al-Shaf ayat 13)

Dan terakhir terdapat pada surah al-An'am 153 yang berbunyi:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ
ذَٰلِكُمْ وَصَلْتُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka
ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena

jalan-jalan itu menceraikan beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (Q.S Al-An'am ayat 153)⁴

Jadi penjelasan dari ke empat surah di atas, bahwasanya partai Islam, sebagai dasar pemikiran *syumuliyat al-Islam* (kesempurnaan Islam ; Islam agama dan Negara) dengan menjadikan partai ini sebagai partai dakwah yang merefleksikan ke seluruh sikap, perilaku dan aktifitasnya. Para kader tersebut mempunyai militansi serta kesolidan yang tinggi baik itu secara personal, struktural maupun konseptual. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui para kadernya mampu melakukan fungsinya sebagai partai politik Islam yang jarang dilakukan oleh partai politik lainnya, seperti memberikan pendidikan serta pemberdayaan politik terhadap rakyat melalui aktivitas-aktivitas serta program-program yang digunakan. Sehingga rakyat memahami hak serta kewajibannya sebagai warga Negara dan menyadari wewenang dan kewajiban pemerintahannya.

Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak dasarnya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut. Partai berlambangkan dua bulan berwarna kuning emas, dengan garis lurus diantara kedua bulan sabit, yang juga berwarna emas. Bulan sabit dan garis lurus tersebut berada dalam satu kotak berwarna hitam dan dibawahnya terdapat tulisan "SEJAHTERA". Diatas kotak hitam ada sebuah persegi panjang yang panjangnya sama dengan kotak dibawahnya tetapi dengan ketinggian

⁴Ibid., hlm 149.

yang lebih pendek didalamnya tertulis “PARTAI KEADILAN” dengan tulisan berwarna kuning emas.

2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Setelah berganti nama dari Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka visi dan misinya pun mengalami perubahan redaksi sesuai dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tidak berubah maknanya. Dan dengan visi dan misi baru ini nampaknya PKS lebih bersifat nasionalisme dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa Indonesia secara universal.

Visi Umum :

“Sebagai partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat bangsa”.

Visi Khusus :

“Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai:

- a. Partai da’wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa.
- b. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam didalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
- c. Kekuatan mempolopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang Rahmatan lil’alamin.

d. Akselator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Misi :

- a. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
- b. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami diberbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
- c. Membangun opini umum yang Islami iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang soluktif dan membawa rahmat.
- d. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- e. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- f. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan istilah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam melealisir agenda reformasi.
- g. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedzaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

C. Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mendukung Pemerintahan Kabupaten Samosir

Keberadaan PKS di Kabupaten Samosir mendapat respon yang kurang baik. Hal ini nampaknya terkait dengan program-program yang dikelola PKS dalam memberdayakan masyarakat Islam di Kabupaten Samosir tidak terlalu berperan aktif dalam berdemokrasi, pandangan serupa ternyata diutarakan juga oleh Pardamean Sihotang, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Samosir.

Respon masyarakat yang kurang baik terhadap dakwah, baru sebatas potensi ketika dikelola sedemikian rupa, sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan. Kekuatan partai dakwah terlihat dari kemampuannya merebut hati sekaligus menguasai semua lapisan massa dan mendistribusikan potensi yang dimiliki para anggota ke dalam satu program, dan satu garis, yakni dengan menempatkan mereka sesuai pada tempatnya.

Respon masyarakat Islam Kabupaten Samosir yang kurang baik terlihat karena lewat bakti sosial terhadap masyarakat Samosir karena program rutin, minimal diadakan 3 dapil, dari sisi agama Partai Keadilan Sejahtera melakukan pengajian di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir dan memberikan bantuan berupa sejadah, sarung kepada masyarakat muslim yang di Samosir. Bidang politik, "PKS hanya berperan dalam pemberdayaan masyarakat muslim, seperti dibidang politik melalui dukungan para kader-kader partai untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat ketika ingin melakukan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan umum lainnya supaya masyarakat muslim di Kabupaten Samosir

dapat memilih pemimpin yang amanah, jujur dan mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Samosir pada umumnya.⁵

Kabupaten Samosir memiliki jumlah penduduk beragama Islam 1886 orang. Kemudian jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) berjumlah 1250 orang. Hal inilah yang membuat partai PKS (Partai Keadilan Sejahterah) di kabupaten samosir tidak bisa memperoleh jumlah suara secara keseluruhan dari DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pada pemilihan Legislatif 2014 partai PKS mengusung langsung ketua DPD untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil 3. Namun didalam pencalonannya tersebut tidak tercapai karena disebabkan hasil suara yang diperoleh tidak memenuhi syarat untuk dapat memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Samosir.

Kemudian, dari jumlah DPT yang beragama Islam dengan jumlah 1250 orang, banyak yang beralih ke partai-partai lain seperti partai Demokrat, Hanura, PDIP, Nasdem. Hal inilah yang menyebabkan partai PKS tidak dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir.⁶

Sistem tarbiyah adalah sistem kaderisasi inti dari PKS, dalam tarbiyah inilah kader-kader PKS dibina dan dibentuk menjadi sosok kader yang militan dan loyal kepada partai, hal ini dikarenakan kader-kader PKS di didik dengan menggunakan kurikulum yang diterbitkan oleh PKS sendiri.

Langkah awal yang dilakukan PKS dalam sistem kaderisasinya adalah pembinaan pribadi, pembinaan pribadi kader PKS mampu memberikan keterampilan-

⁵ Wawancara Pribadi Dengan Pardamean Sihotang, Ketua DPD Samosir, Minggu 22 Juli Pukul 10-00 Wib

⁶Wawancara dengan Seketaris Umum Partai PKS, Kamis 12 Juli, Pukul 14-00 Wib

keterampilan pribadi kader maupun interaksi antara kader. Pembinaan pribadi kader sangat penting dalam proses dakwah PKS, sebab PKS memandang bahwa proses dakwah parlemen hanya bisa dilakukan dengan pribadi yang bersih dan shaleh.

Jika jiwa pribadi bersih dan shaleh maka secara otomatis dakwah yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya setelah melakukan pembinaan pribadi kader adalah pembinaan keluarga, ini juga sangat penting dan saling berhubungan sebab dengan membentuk pribadi yang bersih dan shaleh menjadikan kunci dalam membentuk keluarga yang shaleh, dan dari keluarga shaleh yang terbentuk inilah yang akan membentuk masyarakat yang Islami.

Selain sistem kaderisasi, ideologi partai juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan kader PKS loyal dan militant terhadap perjuangan partai. Ideologi Islam yang dianut PKS dapat menjadi pilar-pilar dan dasar perjuangan para kader PKS. Islam secara eksternal adalah bentuk *diferensiasi* dan sekaligus *positioning* PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya.⁷

Politik selalu ada pertarungan karena dalam setiap kekuasaan pasti selalu ada pihak penentang dan pihak pendukung sehingga kehadiran pertempuran untuk mengakhiri perebutan kuasa dan pengaruh merupakan kunci utama. Kontribusi politik adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita politik. Dalam konteks pertarungan politik untuk memperebutkan sebuah jabatan, maka kontribusi yang matang di bidang

⁷H.Hilmi Aminuddi, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera*: 2008, hlm. 33.

pemilihan anggota legislatif memegang peranan yang sangat penting karena tanpa adanya perencanaan strategi, tidak mungkin kemenangan akan diraih.

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader yang berideologi Islam, bahkan bisa dikatakan bahwa PKS adalah satu-satunya partai kader murni yang ada di Indonesia, dimana kadernya yang duduk di bangku DPR maupun DPRD merupakan kader asli binaan PKS yang telah melalui proses panjang dalam jenjang kaderisasi PKS, tidak heran jika kekuatan utama PKS berada pada pergerakan kadernya yang militan.

Sebagai partai Islam yang juga partai dakwah, PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat sebagai program utama partai.⁸

Partai dakwah sendiri dalam pandangan Partai Keadilan adalah manifestasi dari konsep kejamahan, dimana gerakan dari partai dakwah lebih identik dengan unsur solidaritas untuk mengatasi diferensiasi masalah suku, ras maupun bahasa. Selain itu partai ini juga memproklamkan dirinya sebagai partai kader, akan tetapi didalam kajiannya tidak ada penjelasan secara rinci keberadaan partai kader didalam tubuh Partai Keadilan.

⁸Wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisas Partai PKS, Sabtu 14 Juli Pukul 10-00 Wib

Dalam Partai Keadilan tidak murni partai kader, namun kombinasi antara partai kader dengan partai massa (*Nukhbawiyah Jamhiriyah*). Kaderisasi didalam tubuh Partai Keadilan memiliki sistem yang sistematis dan metodik. Kaderisasi berfungsi sebagai sarana rekrutmen calon anggota partai dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Alur ini dijalankan dengan mekanisme terbuka, agar selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia partai.⁹

PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar/aqidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya. Masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya.

Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila ikhlas untuk mencari ridha Allah Swt, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.¹⁰

⁹Hepi Andi Bastoni, Penjaga Nurani Dewan, Pustaka Albustan 2006, hlm. 137.

¹⁰MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Plat Foam PKS*, (Jakarta: MPP, 2000), cet ke-1, hlm.32-33.

D. Strategi Politik yang Dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapat Memperoleh Suara di Kabupaten Samosir

Dalam rangka merebut hati masyarakat Kabupaten Samosir setiap partai politik diharuskan untuk bekerja semaksimal mungkin untuk dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki tidak terkecuali PKS. Sebagai partai kader PKS tentunya mengharapkan kerja keras dari seluruh kadernya untuk dapat memenangkan pemilu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal inilah yang di pertegas oleh ketua DPD PKS Kabupaten Samosir Pardamean Sihotang: yang menjadi kekuatan PKS pada pemilu legislatif adalah:

1. Supporting dari seluruh kader- kader Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Samosir
2. Menarik simpati dari masyarakat, semakin banyak simpati yang mereka terima dari masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk memenangkan pemilu.
3. Dengan mengandalkan strategi politik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat Samosir, pelayanan tersebut berupa program-program yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten Samosir.
4. Mengajak masyarakat untuk memahami visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Samosir.

Adapun susunan Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Samosir periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Pardamean Sihotang	Ketua Umum
Zulfikar	Sekretaris Umum
Kordiawaty	Ketua Bidang Kaderisasi

Kemudian lokasi Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Samosir adalah Jln. Raya Rianiate, Pintu Sona-Pangururan.

Mengacu hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif 2014 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samosir, empat dari 10 pimpinan partai politik (parpol) yang ikut bertarung memperebutkan 25 kursi DPRD Samosir periode 2014-2019 kalah dari pesaingnya, sehingga gagal jadi anggota dewan. Keenam pimpinan partai politik yang gagal jadi anggota DPRD periode 2014-2019 adalah Ketua DPD Partai Nasdem, Manogu Sihaloho, dan Ketua DPD PDI Perjuangan, Pahala Tua Simbolon yang sama-sama mencalonkan diri di Dapil-1 yang melingkupi Kecamatan Simanindo, dan Kecamatan Ronggur Nihuta.

Lalu Ketua DPD PKPI Marajohan Sitinjak yang bertarung di Dapil-2 (Palipi, Nainggolan dan onan rungu), kemudian Ketua DPD PKS Samosir, Pardamean Sihotang, yang bertarung di Dapil-3 (Harian, Sianjur Mulamula dan Sitio-tio). Selain pimpinannya gagal meraih kursi wakil rakyat di wilayah pemilihannya masing-masing, dua di antara partai tersebut juga gagal meraih kursi dari dapil dimaksud.

Kedua partai politik yang sama sekali tidak meraih kursi dari dapil yang ikut diperebutkan pimpinannya adalah PKS dan PKPI dan sama sekali tidak memiliki wakil di DPRD Samosir periode 2014-2019.

Tahun 2019, akan menjadi pertarungan penting bagi PKS dan kepemimpinan Sohibul Imam. Di tengah pusaran korupsi yang membelit sejumlah partai pada 2012-2014, pada pemilu 2014 PKS relatif masih bisa bertahan sebagai partai papan tengah, meskipun kehilangan sebesar 1,09% suara dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan tiga pemilu sebelumnya, pemilu 2014 adalah prestasi yang tidak menggembirakan bagi PKS.

Sejak pemilu 1999 sampai 2009, suara PKS selalu mengalami tren kenaikan. Pada pemilu 1999, ketika masih bernama Partai Keadilan, PKS mendapatkan 1,36% suara sah secara nasional dan naik menjadi 7,34% pada pemilu 2004, lalu naik lagi menjadi 7,88% pada pemilu 2009. Pada pemilu 2014, suara PKS turun menjadi 6,79%.

Tentu tidak ada pihak yang bisa di salahkan dari penurunan suara PKS. PKS perlu berbenah bila ingin tetap bertahan di kisaran 6-7% suara. Sebagai orang luar PKS, saya melihat, PKS kehilangan idealisme yang ia perjuangkan sejak awal berdiri partai, yakni integritas dan moralitas politik. Dua hal ini yang menjelaskan kenaikan suara PKS sejak 1999 sampai 2009. Bila ingin bertahan, PKS harus menerjemahkan nilai integritas dan moralitas dalam program dan kebijakan partai secara nasional.¹¹

¹¹<https://m.kumparan.com>, arya-fernandes diakses pada tanggal 9-8 pukul 18-32

Dalam melakukan program-program tentunya ada faktor yang menjadi kendala dan merupakan tantangan yang menghambat jalannya pemberdayaan masyarakat Islam yang ada di Kabupaten Samosir. Fakto-faktor itu adalah:

1. Tantangan yang dihadapi PKS dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi ini sebenarnya sedikit, salah satunya yang mendasar adalah hanya terbentur pada masalah dana, karena PKS memiliki begitu banyak program kerja pemberdayaan dan hanya memiliki dana yang minimum, walaupun demikian semangat juang PKS demi masyarakat khususnya di Kabupaten Samosir ini tidak rapuh seperti kerupuk, karena mereka juga memiliki anggaran yang dikumpulkan berdasarkan iuran/kas anggota, itulah yang membantu berjalannya program-program PKS.
2. Sikap dan perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dalam kehidupan yang tidak demokratis dan tidak pula untuk pemberdayaan masyarakat. Sistem pendidikan baik formal, non formal maupun informal yang selama ini dipraktekkan kurang kondusif terhadap pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi sehingga ini juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh PKS dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Ekses negatif dari pengaruh global. Artinya ideologi internasional yang meliputi demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup ketika sampai disini dipahami oleh masyarakat ekses negatifnya. Umpamanya, demokrasi dipahami sebagai kebebasan tanpa aturan dan tanpa etika, HAM dipahami sebagai kebebasan tanpa aturan dan tanpa etika, HAM dipahami sebagai egoisme mutlak yang

mengakibatkan perampasan hak orang lain dan anarkisme. Contoh lain mengenai ekses negatif ini adalah kemewahan orang barat dipahami sebagai glamour yang menyebabkan jalan pintas dengan cara KKN, bukan dipahami sebagai hasil kerja keras.

4. Faktor internal bangsa kita, baik nilai-nilai atau tradisi dan budaya local, etnis, atau mungkin juga pemahaman agama yang dipeluk dan dipraktekkan oleh pemeluknya di Negara kita. Tradisi dan budaya Batak umpamanya tidak seluruhnya mendukung pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi, namun tidak sedikit yang justru menjadi kendala terhadapnya.¹²

Jadi tidak heran jika kader-kader PKS berjuang dengan sekuat tenaga dalam memperjuangkan partainya, sebab mereka meyakini apa yang mereka lakukan dan perjuangkan adalah semata-mata untuk kemaslahatan ummat, dan merupakan ibadah kepada Allah SWT. Selain militansi dan loyalitas kadernya, salah satu kekuatan PKS lainnya adalah infrastruktur partai. Infrastruktur yang dimaksud adalah kepengurusan partai sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan yaitu DPC (Dewan Pengurus Cabang) PKS yang tersebar di setiap Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Samosir.

Infrastruktur inilah yang akan bergerak dan berjuang untuk melakukan konsolidasi dari bawah yaitu dari tingkat Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan, peran infrastruktur ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab infrastruktur inilah

¹² Wawancara dengan Ketua DPD PKS Samosir Pardamean Sihotang, Sabtu 28 Juli Pukul 10-00 Wib

yang menjadi poros perjuangan dan menjadi nadi PKS dalam upaya mencapai target pada pemilu.

Bahkan infrastruktur partai ini menentukan hasil suara yang akan diperoleh PKS. Kekompakan infrastruktur PKS inilah yang akan menjadi cerminan kekuatan PKS, semakin kompak dan solid infrastruktur PKS, maka akan semakin besar kekuatan PKS, dalam hal ini kekompakan para pengurus PKS telah mereka buktikan dengan seringnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka sosialisasi pemilu 2014, dan acara yang dilakukan pengurus PKS tersebut selalu ramai, hal ini membuktikan bahwa infrastruktur PKS benar-benar kompak dan solid dalam menghadapi pemilu tahun 2014. Selain mengandalkan kader dan infrastruktur, PKS juga memiliki kekuatan lainnya yaitu dari kalangan eksternal partai yang terbentuk menjelang pemilu legislatif.¹³

Dalam hal anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam. Partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa, sebagaimana maksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

¹³Wawancara dengan Sekretaris Umum Partai PKS, Selasa 17 Juli, Pukul 10-00 Wib

¹⁴Anggaran Dasar PKS pasal 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan, bahwa :

Partai Politik Islam di Kabupaten Samosir khususnya PKS, tidak memberikan kontribusi dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Samosir, disebabkan hasil suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Samosir.

Keberadaan PKS di Kabupaten Samosir mendapat respon yang kurang baik, hal ini nampaknya terkait dengan program-program yang dikelola PKS dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Kabupaten Samosir tidak terlalu berperan aktif.

Partai PKS di Kabupaten Samosir hanya berperan dalam pemberdayaan masyarakat muslim, seperti dibidang politik melalui dukungan para kader-kader partai untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat ketika ingin melakukan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan umum lainnya supaya masyarakat muslim di Kabupaten Samosir dapat memilih pemimpin yang amanah, jujur dan mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Samosir pada umumnya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kontribusi partai politik adalah undang-undang No. Tahun 2011 menyebutkan partai politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ketentuan peraturan perundang-undangan partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke-atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat.

Karena partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi maka di banyak negara terdapat pendanaan publik bagi partai politik. Penyaluran dana publik tersebut di batasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas.

B. Saran-saran

Penulis bersyukur atas selesainya skripsi ini mudah-mudahan tulisan yang sangat sederhana ini bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat dengan harapan sedikit lebih menambah pengertian dan ilmu dalam memahami demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, karena dua kunci itu dapat membawa masyarakat lebih berguna bagi bangsa dan negara.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kehidupan berdemokrasi khususnya di Kabupaten Samosir merupakan keharusan untuk diupayakan, dengan segala bentuk dan jenis kebijaksanaan dan strategi serta program atau kegiatan nyata berupa konsep dan upaya yang dilakukan oleh semua lapisan yang ada di Kabupaten Samosir.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar PKS pasal 5

Hepi Andi Bastoni, Penjaga Nurani Dewan, Pustaka Albustan 2006

H.Hilmi Aminuddin. 2008. *Memperjuangkan masyarakat Madani: MajelisPertimabangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera*

[https// googleweblight. Com](https://googleweblight.com) diakses pada tanggal 02-08 pukul 09.08

MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Plat Foam PKS*, (Jakarta: MPP, 2000), cet ke-1

Iqbal, Muhammad & Nasution, Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Islamislogic.wordpress.com ‘‘40 Hadis Tentang Pemimpin dan Penjelasannya’’ diakses pada tanggal 01-10-2018 pukul 11.00

Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Islam dan MasyarakatModern: Teori Fakta dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2011

Departemen Agama R.I, *Al-Qu’an dan Terjemahannya* ,(Sabiq, 2009)

Sy MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Plat Foam PKS*, (Jakarta: MPP, 2000), cet ke.-1

Samsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001

Sukarja, Ahmad *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perrspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Jejak-Jejak Islam Politik Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2004

Wahid, Abdurrahman dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra- Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 1999

Abdurrahman Wahid dkk, *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Politik*, Bandung : Fokusmedia, 2009

Thoha, Miftah *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012.

[.www.Indonesiastudent.com](http://www.Indonesiastudent.com) diakses pada tanggal 20-04-2018 Jam 09-05

www.Pendapatahli.com diakses pada tanggal 24-09-2018 Jam 09-05

Wawancara Pribadi Dengan Pardamean Sihotang, Ketua DPD Samosir

Wawancara dengan Sekretaris Umum Partai PKS, Selasa 17 Juli, Pukul 10-00 WIB

Wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisas Partai PKS, Sabtu 14 Juli Pukul 10-00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : ERFAN SITUMORANG
Nim : 1410300040
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Hukum TataNegara (HTN)
Alamat : Samosir

2. Nama Orang Tua
Ayah : RAYA SITUMORANG
Pekerjaan : TANI
Alamat : SAMOSIR
Ibu : NURHAIDA SIMARMATA
Pekerjaan : PNS
Alamat : SAMOSIR

3. Pendidikan
 - a. SD N 173771 JanjiMartahan, Tamat 2007
 - b. SMP N 1 Harian, Tamat 2010
 - c. SMK N 1 Harian, Tamat 2013
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.